

BAB III

ROHINGYA DI BANGLADESH

Konflik Rohingya di Myanmar yang sudah terjadi sejak lama hingga saat ini belum terselesaikan membuat sebagian besar dari etnis Rohingya memutuskan untuk mencari tempat perlindungan yang lebih aman dengan mengungsi ke negara lain. Negara-negara yang menjadi tujuan pengungsian Rohingya diantaranya adalah Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Pakistan, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Saat ini Bangladesh merupakan negara pertama yang menjadi tempat tujuan pengungsian etnis Rohingya dikarenakan letaknya yang sangatlah dekat dengan Myanmar dimana antara Myanmar dan Bangladesh hanya dipisahkan oleh sungai Naf. Bahkan Bangladesh merupakan negara dengan pengungsi Rohingya terbanyak di dunia. Selain Bangladesh, Etnis Rohingya mengungsi ke negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand melalui jalur laut (Yesmin 2016). Mereka menggunakan perahu sehingga masyarakat di Asia Tenggara menyebut mereka dengan sebutan manusia perahu atau *boat people*.

Bangladesh yang beribukota di Dhaka merupakan negara berkembang dengan total penduduk kurang lebih 147 juta jiwa dan terletak di Asia Selatan (Imran 2014), diantara Myanmar dan India (CIA 2017). Luas wilayah Bangladesh yang tidak terlalu luas membuat tingkat kepadatan penduduknya tinggi, yang menjadikan Bangladesh sebagai negara dengan penduduk terpadat ketujuh didunia (UNHCR 2007). Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan tersendiri di dalam negeri Bangladesh seperti kemiskinan. Bangladesh merupakan negara termiskin di wilayah Asia Selatan. Total GDP tahunan Bangladesh yaitu \$246 Milyar (BIPPS n.d.). Bahasa yang digunakan oleh penduduk Bangladesh adalah Bahasa Bengali (BBC 2017). Dahulu Bangladesh merupakan

bagian dari Pakistan Timur dan berhasil memerdekakan diri menjadi negara Bangladesh pada tanggal 16 Desember 1971 (CIA 2017). Tepat setelah kemerdekaannya, Bangladesh terus kedatangan pengungsi Rohingya hingga saat ini.

A. Kedatangan Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Kedatangan pengungsi Rohingya dari Rakhine (pada waktu itu disebut Arakan) ke Cox's Bazar, Bangladesh pertama kali tercatat pada tahun 1784 ketika Raja Myanmar (pada waktu itu disebut Burma) Bodawpaya menyerbu Arakan (Imran 2014). Kemudian etnis Rohingya kembali lagi ke Arakan bersamaan dengan kolonialisme Inggris di Myanmar. Setelah itu, Rohingya kembali mengungsi ke Bangladesh di tahun 1942 saat Jepang menginvasi Burma pada Perang Dunia ke II.

Gelombang pengungsi Rohingya yang sangat *massif* ke Bangladesh terjadi di tahun 1978 dimana sekitar 200.000 orang menyeberang ke Bangladesh sebagai akibat dari adanya operasi Nagamin atau *Dragon King*. Operasi *Dragon King* yang diadakan oleh Junta Militer di tahun 1978 merupakan operasi untuk mengidentifikasi para imigran ilegal seperti imigran dari China, India, dan etnis Rohingya yang berada di Negara Bagian Rakhine dan Kachin. Para imigran ilegal ini akan ditahan, disiksa, bahkan dibunuh. Akibatnya, ratusan ribu etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh untuk menghindari operasi tersebut.

Gelombang kedua kedatangan pengungsi Rohingya secara besar-besaran ke Bangladesh terjadi di tahun 1991-1992. Di tahun 1991, Junta Militer Myanmar meningkatkan aktivitasnya di Maungdaw, Buthidaung dan Rathedaung (Abrar n.d.). Junta Militer Myanmar melanggar hak asasi manusia para etnis Rohingya dengan menerapkan sistem buruh paksa terhadap etnis Rohingnya, pelecehan seksual, dan

perusakan properti (Hassan Faruk Al Imran 2014). Hal tersebut mengakibatkan sekitar 250.000 etnis Rohingya mengungsi di Teknaf, Ramu, Ukhia, dan Cox's Bazar melalui Sungai Naf (Abrar n.d.). Pengungsi Rohingya yang datang di tahun 1978 dan 1992 secara berangsur dipulangkan lagi ke Myanmar melalui program repatriasi yang ditandatangani oleh Myanmar dan Bangladesh di tahun 1992.

Memuncaknya konflik etnis antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine di wilayah Rakhine pada tahun 2012 membuat sekitar 168.000 pengungsi Rohingya memutuskan untuk mengungsi ke Bangladesh dengan menggunakan kapal (UNHCR, Over 168,000 Rohingya likely fled Myanmar since 2012 2017). Dalam konflik ini, etnis Rakhine didukung oleh Pemerintah Myanmar dan tentara militer Myanmar *atmadaw* untuk menyerang etnis Rohingya.

Kemudian pada tahun 2016 terjadi Penyerangan terhadap tiga penjaga perbatasan di Rakhine bagian Utara pada tanggal 9 Oktober 2016 oleh militan Rohingya yang disebut *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) dan mendorong militer mengadakan operasi kontra-terorisme melakukan serangan balasan terhadap etnis Rohingya. Sekitar 150 orang dibunuh dan 3 desa hangus dibakar oleh tentara militer Myanmar (ACT n.d.). Hal ini membuat sekitar 90.000 etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh (HRP 2017). Aktivitas militan ARSA dan operasi kontra terorisme masih berlangsung hingga tahun 2017. Etnis Rohingya kembali mengungsi ke Bangladesh bahkan dengan jumlah yang sangat besar. Jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh pada tahun 2017 mencapai 687.000 jiwa.

Pengungsi Rohingya datang ke Bangladesh tepatnya di wilayah Ukhia dan Teknaf, Cox's Bazar (Express 2018) menggunakan perahu dan rakit mengarungi Sungai Naf dan membawa perbekalan seadanya. Sebelum dapat menyeberangi sungai Naf, para pengungsi harus menempuh perjalanan kurang lebih 10 hari (Press 2017). Banyak dari mereka yang

pingsan ditengah jalan karena kelaparan, dehidrasi, dan juga kelelahan. Bahkan tidak sedikit yang meninggal di tengah. Perjalanan menggunakan perahu dan rakit yang menampung banyak orang merupakan perjalanan yang sangatlah beresiko. Selain menggunakan perahu dan rakit, para pengungsi Rohingya secara sembunyi-sembunyi mendatangi Bangladesh melalui hutan-hutan di daerah Teknaf dan Ramu.

Perbatasan antara negara Bangladesh dengan Myanmar yang biasa digunakan oleh para pengungsi Rohingya untuk memasuki Bangladesh dijaga oleh polisi perbatasan yang bernama *Bangladesh Defence Rifles* (BDR). Setelah sampai di perbatasan, pengungsi Rohingya akan menunggu di sawah padi sampai BDR memberikan izin untuk memasuki Bangladesh. Proses perizinan ini dapat memakan waktu hingga berhari-hari dan menyebabkan ribuan pengungsi Rohingya harus menunggu bahkan tidur di sawah tersebut. Sambil menunggu, organisasi kemanusiaan yang beroperasi akan memberikan bantuan dan pertolongan pertama seperti makanan dan obat-obatan.

BDR telah dilatih oleh UNHCR untuk menyeleksi dokumen para pengungsi yang dapat didaftarkan menjadi pengungsi legal. Nanti para pengungsi ini akan menyerahkan dokumen ke *Bangladesh Legal Aid and Services Trust* (BLAST) dan akan diteruskan ke pihak *Refugee Relief and Repatriation Commissioner's* (RRRC) dan *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR) untuk menetapkan status dari para pengungsi. Dokumen yang digunakan oleh hampir semua pengungsi Rb ohingya dari Myanmar ketika akan memasuki Bangladesh yaitu *Temporary Residence Cards* (TRC).

Gambar 3.1

BDR menghentikan pengungsi Rohingya di perbatasan



Sumber New York Times 2017

Tidak semua negara yang dituju oleh para pengungsi Rohingya ini mau menerima pengungsi dengan tangan terbuka. Beberapa negara menutup pintu perbatasannya sehingga para pengungsi Rohingya harus kembali terkatung-katung dilaut dengan perbekalan yang sudah berkurang. Hal ini pulalah yang pernah dilakukan oleh Bangladesh. Melalui polisi penjaga perbatasan BDR, Bangladesh pernah menolak menerima pengungsi Rohingya tahun 2016 (International 2016). Para pengungsi ini dipaksa untuk kembali ke Myanmar. Beberapa dari mereka bahkan di tahan oleh kepolisian setempat. Sebelum dipulangkan, Bangladesh tetap membekali mereka dengan obat-obatan dan makanan.

Pengungsian etnis Rohingya ke negara lain juga dimanfaatkan oleh para kelompok kejahatan seperti kelompok kartel penjualan narkoba dan obat-obatan terlarang (*drugs smuggler*) serta kelompok perdagangan manusia (*human trafficking*). Kelompok-kelompok ini akan menunggu di suatu titik, menunggu waktu yang tepat untuk mempengaruhi dan

menculik para pengungsi Rohingya. Kebanyakan dari para pengungsi ini merupakan kaum wanita yang tidak memiliki pendamping laki-laki sehingga menjadi sasaran bagi para kelompok penjahat. Para wanita ini terancam berakhir di pasar prostitusi gelap internasional.

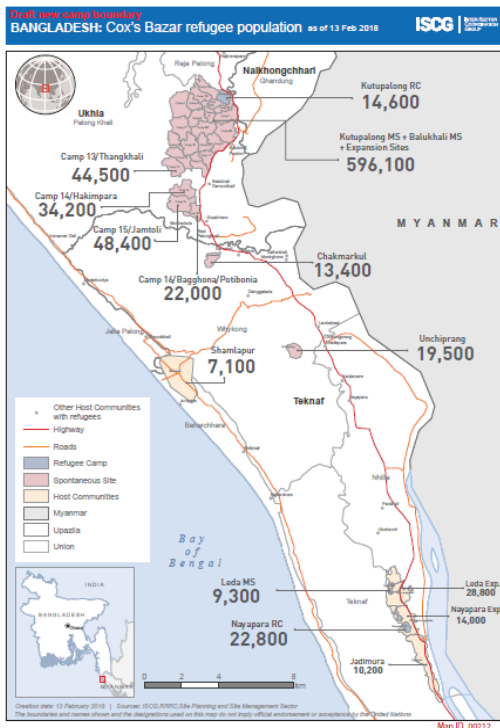
B. Kondisi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Jumlah Pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh saat ini yaitu sekitar 898.300 orang yang mana sekitar 117.000 pengungsi hidup berbaur dengan warga lokal Bangladesh di Cox's Bazar (ISCG 2018). Jumlah ini merupakan yang terbesar jika dibanding dengan negara penerima pengungsi lain seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Akan tetapi walaupun jumlahnya sangat banyak, tidak semua dari pengungsi Rohingya terdaftar secara resmi sebagai pengungsi oleh Pemerintah Bangladesh. Sebagian besar dari pengungsi ini tidak terdaftar secara resmi sebagai pengungsi atau secara tidak langsung merupakan pengungsi ilegal dan oleh Pemerintah Bangladesh disebut sebagai *Undocumented Myanmar Nationals*(ECHO 2017).

Bangladesh menyediakan tempat penampungan atau *camp* resmi bagi para pengungsi legal yang dibuat bersama *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Saat ini terdapat dua *camp* resmi yang ada di Bangladesh, yaitu *camp* 'Kutupalong' di Ukhia dan *camp* 'Nayapara' di Teknaf, Cox Bazar, pesisir Tenggara Bangladesh (Abdul Hasnat Milton 2017). Selain itu terdapat 10 tempat penampungan lain yang saat ini ada di daerah Cox's Bazar, diantaranya yaitu, Balukhali *Make Shift Camp*, Chakmarkul *Camp*, Unchirang *Camp*, *Camp* 13 Thangkhali, *Camp* 14 Hakimpara, *Camp* 15 Jamtoli, *Camp* 16 Bagghona, Shamlampur, Leda *Make Shift Camp*, serta Jadimura.

Gambar 3.2

Peta tempat penampungan pengungsi di Cox's Bazar, Bangladesh



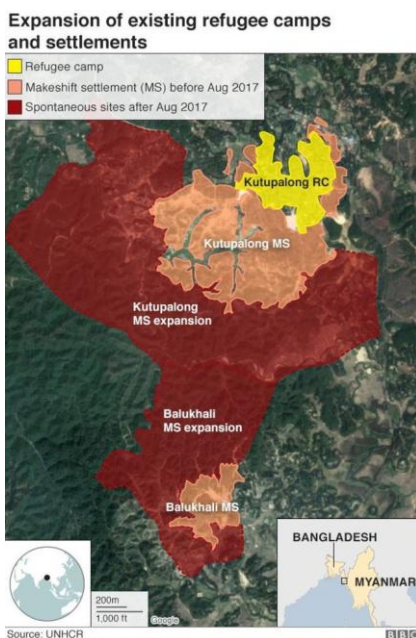
Sumber *Joint Response Plan by ISCG, GoB, and Strategic Executive Group, 2018*

Meningkatnya jumlah pengungsi Rohingya ke Bangladesh secara drastis sejak bulan Agustus 2017 membuat Pemerintah Bangladesh dan UNHCR memperluas beberapa tempat penampungan di Cox's Bazar seperti Kutupalong, Balukhali, Leda, dan Nayapara. Saat ini *Kutupalong Camp* dan *Balukhali Makes Shift Camp* menampung pengungsi Rohingya terbanyak di Bangladesh, yaitu 602.000 orang. Para pengungsi ilegal tidak tinggal di *camp* resmi melainkan tinggal di tempat

penampungan sementara (*makeshift camp*) dan juga tinggal berbaur dengan warga lokal di wilayah Cox's Bazar dan wilayah-wilayah lain di Bangladesh. Pengungsi yang tinggal berbaur didekat pemukiman warga lokal mudah berintegrasi dengan warga lokal karena kemiripan bahasa dan ciri-ciri fisiknya.

Gambar 3.3

Peta Perluasan Tempat Penampungan Kutupalong dan Balukhali



Secara administratif, Pemerintah Bangladesh memiliki perwakilan untuk mengurus aktivitas pengungsi di *camp* Kutupalong dan Nayapara, yaitu *Refugee Relief and Repatriation Commissioner's* (RRRC) (DIS 2011). RRRC bekerjasama dengan UNHCR dan Organisasi kemanusiaan lainnya seperti *International Organization for Migration* (IOM), *Human Right Watch* (HRW), *Bangladesh Red Crescent*

Society (BDRCS), World Food Programme (WFP), Medicins Sans Frontieres (MSF), Save the Children International (SCI), dan Inter-Sector Coordination Group (ISCG) untuk mengatur dan mengontrol aktivitas para pengungsi Rohingya. RRRC nantinya akan memberikan laporan kepada Ministry of Food and Disaster Management (MFDM).

Dalam mengelola aktivitas para pengungsi di tempat penampungan, RRRC dan UNHCR dibantu oleh suatu struktur internal yang anggotanya merupakan orang Rohingya sendiri yang disebut dengan *Mahjee*. *Mahjee* memiliki pengaruh dan kekuasaan untuk mengatur para pengungsi Rohingya yang ada di tempat penampungan. Karena sistemnya yang korup dan sering meminta pajak lebih terhadap para pengungsi, sistem *Mahjee* ini akhirnya dibubarkan oleh Pemerintah Bangladesh dan UNHCR pada tahun 2007 (DIS 2011). Tidak dapat dipungkiri adanya *Mahjee* dikalangan para pengungsi membuat suasana ketidakamanan bagi para pengungsi Rohingya semakin meningkat. Saat ini sistem representatif pengungsi Rohingya (*committee of refugees*) untuk membantu mengurus aktivitas para pengungsi dipilih melalui kelompok yang terpilih seperti para tetua atau imam (UNHCR, Bangladesh: Analysis of Gaps in the Protection of Rohingya Refugees 2007).

Tempat penampungan pengungsi atau *camp* yang ada di Bangladesh di bangun di lokasi yang tidak rata atau berlembah-lembah. Pada saat musim hujan, daerah yang lebih tinggi rawan terjadi tanah longsor dan daerah yang lebih rendah rawan terjadi banjir. Selain itu jika sedang musim hujan, tingkat kelembapan di area penampungan semakin tinggi sehingga meningkatkan resiko beberapa penyakit terutama penyakit kulit.

Pengungsi Rohingya di Bangladesh hidup dalam pemukiman yang penuh dan sesak. Bangunan-bangunan tempat penampungan pengungsi yang dibangun sejak tahun 1992 di Bangladesh berbentuk semi permanen dan

mebutuhkan banyak perbaikan yang signifikan. Karena telah dibangun sejak lama dan telah digunakan oleh banyak orang tentunya tempat penampungan pengungsi Rohingya mengalami banyak kerusakan dan harus segera diperbaiki. Meningkatnya jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh sejak tanggal 25 Agustus 2017 membuat kebutuhan akan *shelter* semakin meningkat. Menanggapi hal ini, Pemerintah Bangladesh menyediakan sekitar 2000 hektar tanah di sekitar tempat penampungan Kutupalong dan meminta UNHCR, IOM, WFP dan organisasi lain untuk membangun *shelter* beserta fasilitas-fasilitas lain yang dibutuhkan oleh pengungsi (UNHCR, Supplementary Appeal - Myanmar Refugees Emergency Response in Bangladesh 2017-2018).

Gambar 3.4

Overcrowded camp in Cox's Bazar



Sumber IOM Desember 2017

Pengungsi Rohingya di Bangladesh diberikan beberapa dokumen sementara oleh UNHCR dan Pemerintah Bangladesh agar lebih terjamin keamanannya. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya adalah *The Pink Form* di tahun 1991-1992, *Family Book* di tahun 1992, *Non Food Item (NFI)*

distribution sheet (Yellow Sheet) di tahun 2007, *Medical Data Sheet* di tahun 2007, *Refugee ID Cards* di tahun 2008, serta *UNHCR Updating of Registers* (DIS 2011).

Kondisi pengungsi Rohingya di Bangladesh lebih baik daripada mereka yang tinggal di negara Myanmar. Akan tetapi pengungsi Rohingya tetap menghadapi banyak permasalahan yang identik dengan apa yang mereka hadapi di Myanmar seperti eksploitasi dan pembatasan, terutama bagi para pengungsi yang tidak terdaftar di tempat penampungan resmi atau dengan kata lain ilegal. Pengungsi legal yang tinggal di tempat penampungan resmi Kutupalong dan Nayapara mendapatkan bantuan makanan, air bersih, obat-obatan, dan sanitasi dari organisasi kemanusiaan Internasional seperti IOM, UNHCR, dan HRW. Pengungsi yang berada di tempat penampungan sementara lebih kesulitan mendapatkan akses bantuan. Paling parah yaitu para pengungsi ilegal yang hidup diantara warga lokal Bangladesh. Berikut merupakan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh para pengungsi Rohingya di Bangladesh.

a. Pembatasan ruang gerak

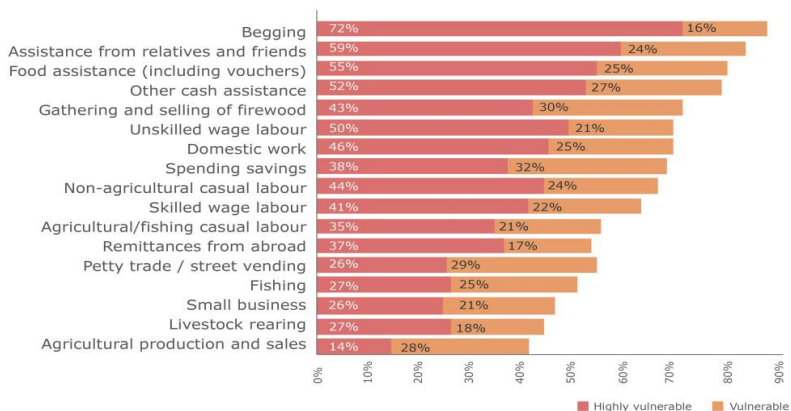
Keterbatasan bermobilisasi merupakan masalah yang dihadapi oleh etnis Rohingya dimanapun mereka berada termasuk di Bangladesh. Pengungsi Rohingya tidak memiliki kebebasan untuk dapat bepergian keluar dari tempat penampungan sementara di Cox's Bazar. Meskipun begitu tetap saja banyak dari pengungsi Rohingya yang melanggar aturan dikarenakan keharusan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara mencari pekerjaan di luar tempat penampungan. Para pengungsi biasanya akan pergi ke Chittagong dan Dhaka untuk mencari pekerjaan serabutan. Di tempat penampungan resmi, terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pengungsi Rohingya untuk bertahan hidup seperti latihan menjahit, pembuatan keset lantai, produksi sabun, laundry, pekerjaan kayu, dan reparasi HP. Menurut

UNHCR, terdapat beberapa toko kecil di dalam *camp* yang menjual berbagai barang komoditi dan menawarkan berbagai jasa perbaikan (DIS 2011).

b. Kesulitan mencari lapangan pekerjaan

Pengungsi Rohingya yang datang ke Bangladesh bukan termasuk *economic migrant*, melihat fakta bahwasanya Bangladesh sendiri bukan merupakan negara kaya dan kemiskinan masih menjadi problematika dalam negeri. Cox's Bazar yang menjadi daerah tempat penampungan pengungsi Rohingya juga merupakan salah satu daerah termiskin didunia yang mana penduduk lokalnya hidup dalam kemiskinan. Hal ini membuat pengungsi Rohingya yang ada di Bangladeh sangat kesulitan dalam hal ekonomi. Hal ini diperparah dengan kebijakan Pemerintah Bangladesh yang melarang pengungsi Rohingya untuk bekerja diluar tempat penampungan. Akan tetapi banyak dari pengungsi Rohingya yang tetap bekerja di luar tempat penampungan karena kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena tidak memungkinkan untuk bisa mendapatkan pekerjaan formal, pengungsi Rohingya bekerja sebagai buruh harian dengan upah sangat rendah. Mereka digaji dengan upah yang sangat rendah, yaitu 100-250 Taka (mata uang Bangladesh) sehari. Gaji yang didapatkan oleh pengungsi Rohingya lebih rendah dari yang didapatkan penduduk lokal Bangladesh yang mendapatkan 300 Taka sehari (DIS 2011). Hal tersebut menimbulkan persaingan di pasar tenaga kerja Bangladesh dimana pengungsi Rohingya yang mau dibayar dengan upah yang lebih rendah lebih dipilih daripada penduduk lokal Bangladesh, sehingga menimbulkan tekanan tersendiri bagi warga lokal Bangladesh.

Grafik 3.1

Vulnerability status of households by income source

Sumber World Food Program 2017 (WFP 2017)

Di dalam laporannya di tahun 2017, *World Food Programme* mendata berbagai jenis pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh dengan tingkat resiko kebahayaannya. Berdasarkan grafik diatas, pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh pengungsi Rohingya semuanya memiliki resiko yang sangat tinggi. Sebanyak 71% tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian bekerja sebagai buruh lokal dan menerima upah yang sangatlah rendah.

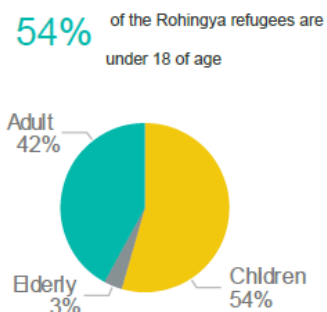
c. Tenaga Kerja Anak-Anak

Berdasarkan laporan RRRC-UNHCR, 54 % pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh merupakan anak-anak. Tidak semua anak-anak ini datang bersama keluarganya. Banyak dari mereka yang datang tidak bersama orang tuanya dikarenakan orang tuanya meninggal akibat konflik Rohingya di Myanmar.

Grafik 3.2

Distribusi Umur Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Age distribution



Sumber RRR-UNHCR 2017 (RRRC-UNHCR 2017)

Jean-Jacques Simon, salah seorang juru bicara dari *United Nations Children's Fund* (UNICEF), mengatakan bahwa sekitar 14.740 anak Rohingya terdaftar sebagai Yatim Piatu (VOA 2017). Karena tidak memiliki orang tua, anak-anak ini terpaksa harus mencari pekerjaan sendiri untuk bertahan hidup. Anak-anak yang masih memiliki orang tua juga dibiarkan bekerja karena mereka membutuhkan uang tambahan. Menurut UNHCR, beberapa anak Rohingya dirawat oleh keluarga lainnya baik itu keluarga Rohingya lain maupun keluarga warga lokal Bangladesh. Anak-anak Rohingya di jual oleh orang tua mereka kepada keluarga lain untuk mendapatkan uang, dan sebagai gantinya anak-anak tersebut harus bekerja untuk keluarga yang membelinya. Hingga saat ini UNHCR terus berusaha untuk menghentikan praktik jual beli anak ini.

d. Kekurangan bahan makanan

Kedatangan pengungsi Rohingya ke Bangladesh dalam jumlah yang sangatlah besar diimbangi dengan kebutuhan akan bahan makanan yang sangatlah besar pula. Bangladesh bekerjasama dengan organisasi kemanusiaan Internasional seperti UNHCR, IOM, dan WFP terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan bahan makanan dari para pengungsi Rohingya. Bantuan akan bahan makanan terus berdatangan untuk para pengungsi Rohingya di Bangladesh. Didalam tempat penampungan resmi, pengungsi akan diberikan *e-voucher* untuk dapat mengakses bantuan makanan yang telah disediakan. *Food voucher* ini merupakan program dari *World Food Programme* (WFP) yang mulai diberlakukan di tahun 2014. Pengungsi ilegal yang tidak terdaftar dalam tempat penampungan resmi lebih mendapat kesulitan untuk mendapatkan bantuan makanan.

Menurut WHO, 24% pengungsi Rohingya yang terdaftar di tempat penampungan resmi menderita malnutrisi akut (HRP, Monitoring Report Rohingya Refugee Crisis Response Plan 2017). Penderita malnutrisi terutama anak-anak berumur 6-59 bulan lebih banyak ditemukan di tempat penampungan resmi Kutupalong (WFP 2017). Akses makanan yang dapat dijangkau oleh pengungsi Rohingya tidaklah banyak. Setiap harinya hanya tersedia sekitar empat jenis makanan, yaitu nasi, minyak, sayur, dan kacang-kacangan. Makanan seperti daging, ikan, dan telur sangatlah susah didapatkan sedangkan buah-buahan dan susu sama sekali tidak dapat diakses oleh pengungsi Rohingya. Para pengungsi Rohingya yang telah lama menetap di Bangladesh dan memiliki *food voucher* memiliki kesempatan lebih besar untuk mengakses nutrisi seperti vitamin A dan zat besi. *Food voucher* ini sangatlah berguna bagi para pengungsi karena mereka dapat lebih mudah mengakses makanan dengan jenis yang lebih beragam. Para pengungsi yang baru saja datang ke Bangladesh dan belum memiliki *food voucher* lebih kesulitan dalam mengakses makanan.

e. Kesulitan akses kesehatan

Salah satu masalah bagi para pengungsi Rohingya di Bangladesh yaitu minimnya akses kesehatan yang tersedia. Selain itu berbagai jenis penyakit yang dimiliki oleh pengungsi Rohingya membutuhkan penanganan yang memadai. Akan tetapi, fasilitas kesehatan dan tenaga medis masih sangatlah kurang dari yang dibutuhkan oleh mereka.

Pengungsi Rohingya di Bangladesh hidup dalam tempat penampungan yang sesak dan kumuh. Kondisi dari lingkungan tempat penampungan pun tidak steril sehingga menjadikan pengungsi Rohingya rentan terkena bebrbagai wabah penyakit. Apabila musim hujan tiba, pengungsi Rohingya akan lebih mudah terkena penyakit kulit. Selain itu dikarenakan asupan makanan yang kurang bergizi, penyakit seperti diare dan malnutrisi bagi anak-anak sering terjadi. Penindasan yang dialami etnis Rohingya selama bertahun-tahun juga membuat banyak dari mereka yang menderita gangguan mental akibat trauma.

f. Pendidikan

Berdasarkan laporan Aljazeera, etnis Rohingya tidak diizinkan untuk mendapatkan pendidikan di sekolahan formal di Bangladesh. Mereka hanya mendapatkan pendidikan dari para relawan yang telah dilatih sebagai guru di sanggar belajar yang disediakan oleh UNICEF, *Save the Children*, dan NGO lokal Bangladesh. Saat ini terdapat sekitar 1100 sanggar belajar di tempat penampungan di Cox's Bazar yang menyediakan pendidikan informal untuk anak-anak Rohingya (Aljazeera, *With no formal schools or jobs, young Rohingya left in lurch* 2018). Aktivitas belajar mengajar menggunakan kurikulum nasional Bangladesh. Tenaga pengajar merupakan relawan dari warga lokal Bangladesh dan juga dari pengungsi Rohingya sendiri. Jumlah tenaga pengajar yang ada saat ini yaitu sekitar 2.720 orang (ISCG 2018).

g. Kesulitan akses air bersih dan sanitasi

Akses air bersih, air yang dapat diminum (*potable water*) dan sanitasi menjadi salah satu permasalahan pengungsi Rohingya di Bangladesh. Infrastruktur yang ada juga banyak yang sudah membutuhkan perbaikan. Di tempat penampungan Nayapara, akses air bersih lebih sulit dibanding tempat penampungan Kutupalong karena tidak memiliki air tanah. Disana hanya terdapat DAM, air permukaan dan air yang dihasilkan dari tanaman yang didistribusikan dua kali sehari setiap harinya (DIS 2011).

h. *Sex and Gender Based Violence*

Berdasarkan laporan dari RRRC dan UNHCR di tahun 2017, 52% dari pengungsi Rohingya merupakan wanita. Menurut *Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN)*, etnis Rohingya masih menerapkan tradisi konservatif dimana anggapan wanita harus berada di dalam rumah dan tidak dibolehkan untuk melakukan perjalanan diluar (DIS 2011). Wanita menjadi objek kekerasan bagi para laki-laki baik suami, ayah, tetangga, warga lokal, dan polisi setempat. Selain itu kasus pelecehan seksual juga marak terjadi di tempat penampungan pengungsi. Pelecehan seksual ini dilakukan oleh baik sesama pengungsi Rohingya, warga lokal, maupun polisi di Bangladesh. Wanita yang sedang sendirian sangatlah rentan mendapatkan pelecehan seksual, sehingga wanita jarang yang bepergian keluar tempat penampungan sendirian untuk bekerja. Kasus poligami marak terjadi dikalangan para pengungsi Rohingya. Seorang laki-laki Rohingya dapat memiliki 2 hingga 4 orang istri (DIS 2011).